



**Peran Komite Sekolah Di Sma Islam An-Nidhon Kecamatan Mijen  
Kabupaten Demak**

**As'ad**

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta  
Email: [asad.ptunu@gmail.com](mailto:asad.ptunu@gmail.com)

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel  
Diterima: 6 Maret 2020  
Direvisi: 18 Maret 2020  
Dipublikasikan: 2 April 2020  
e-ISSN: 2089-5364  
p-ISSN: 2622-8327  
DOI: 10.5281/zenodo.3737930

---

**Abstract:**

The purpose of this study was to analyze the role of school committees in An-Nidhon Islamic High School, Mijen District, Demak Regency. The research uses a qualitative approach and the method used is a case study. Data sources from the study were the head of the school committee, and the headmaster of An-Nidhom Islamic High School as the key informant (the main source) and teachers, education staff, and local community leaders as the second source. The data collection procedure is done by interview, participant observation, and document analysis related to the object of this study. Discussion of the research findings revealed that there were two quite effective roles carried out by An-Nidhom Islamic High School committee as follows: 1) Participation, 2) Supervision as a sub focus and focus of this research was the role of the school committee in An-Nidhom Islamic High School.

**Keywords:** School Committee, Participation, and Supervision.

---

**PENDAHULUAN**

Sekolah merupakan tempat di mana masyarakat menitipkan anak-anaknya untuk belajar di sana. Mereka yakin bahwa di sekolah sudah dirancang kurikulum terseruktur dan sedemikian rupa sehingga anak-anak akan mendapatkan banyak hal seperti ilmu, ahlak, keterampilan, nilai, karakter, dan lain sebagainya. Begitu besar harapan masyarakat terhadap sekolah dan begitu berat tanggung jawab sekolah. Hal tersebut tentu sulit diwujudkan oleh sekolah

jika sekolah berjalan sendiri dan tanpa ada dukungan dari pihak-pihak terkait.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut di atas, semua unsur elemen, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan sekolah. Tentu dengan peran, tugas dan fungsi masing-masing. Pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakannya, masyarakat atau komite sekolah berfungsi sebagai pengawasannya dan sekolah bertugas sebagai pelaksananya. Jika ketiga unsur tersebut dapat berkoordinasi dan bekerjasama

dengan baik, tentu sekolah dengan mudah akan mewujudkan cita-cita pendidikan yaitu mencerdaskan anak bangsa yang berahlak mulia, berbudi luhur, berketerampilan, dan mampu bersaing di kancah global.

Sekolah merupakan bagian yang terintegral dari masyarakat. Sekolah bukan lembaga yang terpisah dari masyarakat. Maka penting dalam hal ini masyarakat lingkungan sekolah atau yang disebut komite sekolah berperan aktif dan totalitas dalam partisipasi dan pengawasan terhadap sekolah di mana mereka menitipkan anak-anaknya. Komite sekolah dan pihak sekolah harus saling berkolaborasi untuk memajukan sekolah. Kedua unsur tersebut saling membutuhkan dan keberlangsungan sekolah tentu juga sangat bergantung pada masyarakat di lingkungan sekolah tersebut.

Banyak para pakar pendidikan berpendapat bahwa maju mundurnya sumber daya manusia pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini komite sekolah terhadap sekolah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat terhadap sekolah di suatu daerah, maka akan maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut.

Oleh karena itu masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembanguan pendidikan atau sekolah di daerahnya. Masyarakat hendaknya harus ditumbuhkan rasa ikut serta memiliki sekolah di daerah sekitarnya. Maju mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat setempat. Sehingga tidak hanya kepala sekolah dan dewan guru yang memikirkan maju mundurnya sekolah, tetapi masyarakat setempat untuk memikirkannya.

Untuk menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia dan berpartisipasi aktif dalam memajukan sekolah, maka perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan cara mensosialsaikan kepada masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan

sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan. Sosialisai tersebut dapat dilaksanakan melalui surat pemberitahuan, spanduk, brosur, peserta didik, dan rapar rutin yang digelar sekolah dengan masyarakat

Atas dasar penjelasan di atas terkait dengan tidak terpisahkannya hubungan masyarakat dengan sekolah dalam mewujudkan cita-cita bersama, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam. Penelitian dilaksanakan di SMA Islam An-Nidhon. Sekolah yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat di desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah. Kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani, dan hanya sedikit dari mereka lulusan sarjana strata satu. Meskipun keberadaan sekolah tersebut di perkampungan, tapi secara fisik bangunan tidak kalah dengan bangunan sekolah di kota. Hal tersebut dapat dilihat bahwa bangunan sekolah terdiri dari tiga lantai dengan fasilitas yang cukup memadai. Setelah dilakukan penelitian lebih mendalam bahwa sekolah terbuka dan menjalin kerjasama secara intensif dengan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Sehingga masyarakat merasa memiliki sekolah tersebut. Bahkan adanya fasilitas sarana olah raga seperti lapangan volley, dan bulu tangkis merupakan hibah dari masyarakat. Agar lebih terukur dalam penelitian, peneliti lebih fokus memeliti peran komite sekolah dan sebagai sub fokusnya adalah partisipasi dan pengawasan.

## **KAJIAN TEORI**

Hubungan sekolah dengan masyarakat yang disebut dengan istilah komite sekolah pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat (Mulyasa, 2011:50). Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Keprmendiknas) Nomor 044 Tahun 2020 di jelaskan bahwa Komite Sekolah

merupakan badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan non sekolah.

Engkoswara dan Komariah (2011: 297) berpendapat bahwa Komite Sekolah adalah lembaga atau badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholders* pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Lebih lanjut Engkoswara dan Komariah menjelaskan bahwa komite sekolah terdiri dari unsur-unsur seperti a) wakil orang tua siswa, b) wakil guru-guru, c) kepala sekolah, d) wakil tokoh masyarakat, e) wakil pengusaha industri, f) wakil pemerintah daerah, g) dan wakil pejabat pengendali pendidikan. Menurut Mulyono (2008:258) komite Sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah. Pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah. Dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite sekolah di harapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya (Hasbullah, 2006:90).

Menurut Purwanto (2012: 189:190) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya komite sekolah adalah a) memelihara kelangsungan hidup sekolah, b) meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan, c) memperlancar proses belajar mengajar, d) memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Lebih lanjut Purwanto menjelaskan secara lebih kongkrit bahwa tujuan dibentuknya komite sekolah adalah a) mengenalkan pentingnya sekolah bagi

masyarakat, b) mendapatkan dukungan dan bantuan moril maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah, c) memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah, d) memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, e) mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak.

Pada dasarnya tujuan didirikannya komite sekolah adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan kemajuan pendidikan di lembaga tersebut. Menurut Prihatin (2011: 84-85) Tujuan tersebut akan terwujud jika kedua pihak baik komite sekolah dan lembaga sekolah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kerja sama harus dimodali dengan itikad baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan.
2. Pihak awam dalam berperan serta dalam membantu dan merealisasikan program sekolah hendaknya menghormati dan mentaati ketentuan atau peraturan yang berlaku di sekolah
3. Berkaitan dengan prinsip dan teknik edukatif, sekolahlah yang lebih berkewajiban dan lebih berhak menangannya
4. Segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
5. Partisipasi atau peran serta masyarakat tidak hanya dalam bentuk gagasan, usulan, saran, ide, tetapi juga berikuk organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah.
6. Peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang tidak mencampuri urusan teknik edukatif atau akademik
7. Peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif, apabila mereka sebagai awan diberi kesempatan memberi dan memahami permasalahan serta cara

pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan sekolah.

Dari penjelasan di atas terkait dengan hubungan dan prinsip komite sekolah dengan lembaga sekolah sudah jelas adanya bahwa tidak dapat dipisahkan antara komite sekolah dan lembaga sekolah. Komite sekolah memiliki peran strategis dalam membantu pengembangan sekolah. Tanpa adanya partisipasi komite sekolah, tentu akan menyulitkan lembaga sekolah dalam mewujudkan program-program pengembangan sekolah. Menurut Pidarta dalam Dwiningrum (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Huneryear dan Heoman (dalam Dwiningrum, 2009: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Rohmat (2010: 96), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Menurut Prihatin (2011: 85-86) menjelaskan banyak cara komite sekolah dalam berpartisipasi dengan lembaga sekolah. Dari bentuk partisipasi komunikasi sampai menimbulkan relasi akhirnya diharapkan dapat membina partisipasi masyarakat. Sumbangan dalam partisipasi dapat diperinci menurut jenis-jenisnya sebagai berikut:

1. Partisipasi buah ide atau gagasan. Sumbangan pikiran, pengalaman dan pengetahuan yang diberikan dalam

pertemuan dan diskusi sehingga menghasilkan suatu keputusan.

2. Partisipasi tenaga, yaitu dengan memberikan tenaga dan waktu untuk menghasilkan sesuatu yang telah diputuskan.
3. Partisipasi keahlian atau keterampilan, yaitu bertindak sebagai ahli, penasehat, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah.
4. Partisipasi harta benda, yaitu berupa iuran atau sumbangan baik dalam bentuk benda atau uang secara tetap atau insidental.

Komite sekolah merupakan wadah yang berfungsi sebagai forum untuk merepresentasikan segala aspirasi, prakarsa, dan partisipasi para *stakeholders* sekolah secara proporsional. Forum ini dapat mengakomodasi dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah dalam banyak hal seperti a) penyusunan rencana strategik sekolah, b) menyusun perencanaan tahunan sekolah, c) mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, ide-ide dan gagasan yang disampaikan oleh anggota komite sekolah, d) memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan, e) mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring atau pengawasan (*school self assessment*) dan melaporkan hasilnya untuk dilaporkan dalam forum Dewan Sekolah (Engkoswara dan Komariah, 2011: 297-98)

Selain berpartisipasi dalam wujudkan program-program sekolah, hal yang tidak kalah penting peran komite sekolah adalah supervisi atau pengawasan terhadap lembaga sekolah. Pengawasan merupakan sebagai alat kontrol dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan oleh lembaga sekolah. Tanpa adanya pengawasan dari komite sekolah maka memungkinkan terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan sudah diputuskan. Menurut Yudi (2012: 39)

menjelaskan bahwa peran komite sekolah dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan di sekolah tidak hanya terhadap fisik material tetapi juga dalam ranah teknis edukatif di sekolah. Pengawasan meliputi kegiatan akademik seperti proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan lembaga sekolah, seperti pelaksanaan program-program sekolah, pembiayaan, pembangunan, pengembangan dan lain sebagainya.

Menurut Sagala (2009: 59) pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku dalam organisasi pendidikan atau sekolah dan apakah tingkat pencapaian tujuan sekolah sesuai dengan yang dikehendaki dan kemudian dari hasil pengawasan tersebut apakah dilakukan perbaikan. Mulyasa (2009: 155) berpendapat bahwa pengawasan mengandung arti segala sesuatu untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai tujuan. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki dalam suatu pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Pasal 205 (1) tahun 2011 menjelaskan bahwa fungsi pengawasan komite sekolah sesungguhnya memang sangat mungkin dilaksanakan oleh komite sekolah, agar komite sekolah dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan di satuan pendidikan sekolah. Menurut Suryosubroto (2014: 197) pengawasan komite sekolah bertujuan sebagai *controlling agency* yaitu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program-program pendidikan dalam hal ini lembaga sekolah. Suryosubroto (2004: 196) menjelaskan ada tiga hal peran komite sekolah dalam pengawasan sekolah sebagai berikut:

1. Pengawasan Akademik, yaitu pengawasan yang menitikberatkan pada masalah-masalah akademik, seperti dalam lingkungan kegiatan

pembelajaran pada saat siswa sedang proses belajar di kelas

2. Pengawasan Administrasi, yaitu pengawasan yang menitikberatkan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya kegiatan pembelajaran. Pengawasan administrasi di dalamnya juga dalam hal pengutan keuangan sekolah kepada siswa-siswinya, baik uang SPP, pembangunan, pengembangan, dan lain sebagainya.
3. Pengawasan lembaga, yaitu pengawasan yang menitikberatkan pada seluruh wilayah sekolah yang berfungsi meningkatkan nama baik atau kinerja sekolah secara keseluruhan.

Purwanto (2012: 89-90) menjelaskan lebih khusus lagi terkait dengan pengawasan komite sekolah terhadap lembaga sekolah. Ada dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah 1) pengawasan umum, artinya pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah, administrasi kantor sekolah, keuangan sekolah, dan lain sebagainya, 2) pengawasan pengajaran, yaitu kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk perbaikan kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan.

## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan studi kasus (*case study*). Fokus penelitian ini adalah peran Komite Sekolah dan sub fokusnya adalah partisipasi dan pengawasan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu: a) observasi yaitu pengamatan secara mendalam terhadap objek penelitian, b)

wawancara yaitu peneliti mewawancarai ketua komite sekolah dan kepala sekolah sebagai *key informan* atau sumber utama, dan sumber ke dua peneliti mewawancarai anggota guru, tenaga kependidikan dan tokoh masyarakat setempat, c) membuat instrument untuk *stakeholders* atau orang-orang yang terlibat di sekolah tersebut untuk mengukur ke validan informasi dan temuan.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Peran komite sekolah terhadap lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah sangat banyak, di antaranya berpartisipasi dalam ide atau gagasan saat rapat dengan pihak sekolah sehingga menghasilkan keputusan untuk dilaksanakan. Pihak sekolah dalam hal ini SMA Islam An-Nidhon selalu melibatkan komite sekolah dalam rapat baik rapat triwulan, semester, maupun waktu kelulusan dan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kegiatan rapat di sekolah tersebut tidak selalu bersifat formal, artinya sesekali rapat dilaksanakan di luar sekolah seperti di balai desa, aula masjid setempat dan di tempat lain. Hal itu bertujuan tercipta suasana santai dan semakin menumbuhkan kedekatan emosional antara komite sekolah dengan lembaga sekolah dan menyadarkan bahwa mencerdaskan siswa-siswa tidak semata tugas sekolah melainkan tugas bersama.

Bentuk partisipasi lain komite sekolah adalah partisipasi materil dalam melengkapi fasilitas, sarana dan prasarana sekolah. Komite sekolah terus membangun komunikasi dengan masyarakat setempat akan pentingnya kelengkapan fasilitas sekolah. Hasilnya adalah penduduk setempat menghibahkan sebidang tanah untuk digunakan sarana olah raga seperti lapangan voli dan bulu tangkis. Tidak hanya sebidang tanah, adapula masyarakat menyumbang seperangkat alat drum band lengkap berikut menanggung gaji instruktornya. Adanya alat drum band tentu manfaatnya dapat dirasakan sampai saat ini, seperti jika ada kegiatan desa anggota drum band SMA Islam An-Nidhon memainkan alat tersebut berkeliling desa sehingga tercipta suasana yang menggemakan.

Selain alat drum band, secara swadaya masyarakat membangun gedung sekertariat bersama. Di mana di gedung tersebut dipakai untuk beberapa sekertariat, seperti sekertariat Organisasi Intra Sekolah (OSIS), Rohis, UKS, Pramuka, dan sekertariat komite sekolah. Adapula bantuan dari kepala desa berupa seperangkat wayang kulit, rebana dan marawis.

Penjelasan tersebut di atas merupakan temuan penelitian terkait peran komite sekolah dalam berpartisipasi aktif untuk memajukan sekolah baik secara moril maupun material. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat para ahli di antaranya pendapat Huneryear dan Heoman (dalam Dwiningrum, 2009: 32) bahwa komite sekolah terlibat secara mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama demi mewujudkan program-program sekolah. Pendapat sama juga dikemukakan oleh Rohmat (2010: 96), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Engkoswara dan Komariah, (2011: 297-98) secara khusus menjelaskan partisipasi komite sekolah. Dia mengibaratkan komite sekolah sebagai forum untuk merepresentasikan segala aspirasi, prakarsa, dan partisipasi para *stakeholders* sekolah secara proporsional. Forum ini dapat mengakomodasi dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah dalam banyak hal seperti a) penyusunan rencana strategik sekolah, b) menyusun perencanaan tahunan sekolah, c) mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, ide-ide dan gagasan yang disampaikan oleh anggota komite sekolah, d) memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah,

fasilitas pendidikan, pengadaan biaya pendidikan, e) mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring atau pengawasan (*school self assessment*) dan melaporkan hasilnya untuk dilaporkan dalam forum Dewan Sekolah.

Selain partisipasi, peran yang cukup penting bagi komite sekolah adalah pengawasan terhadap lembaga sekolah. Adapun bentuk-bentuk pengawasan komite sekolah di SMA Islam An-Nidhon di antaranya adalah masalah keuangan sekolah. Lebih khusus lagi dalam hal pungutan biaya sekolah. Seperti uang masuk Peserta Didik Baru pada ajaran baru, SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan, biaya Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Nasional dan *study tour* bagi kelas 12 setelah Ujian Nasional dilaksanakan. Dengan meminta rincian pembiayaan dan penggunaannya, komite sekolah melakukan pengawasan menggunakan analisis wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. Jika dirasa ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan terkait pungutan sumbangan tersebut, maka komite sekolah meminta penjelasan kepada pihak sekolah dan mencari solusi bilamana dirasa membebani peserta didik dengan melalui penggalangan dana subsidi di lingkungan desa setempat.

Selain pengawasan keuangan sekolah, komite sekolah juga berperan aktif dalam akademik, yaitu pengawasan terhadap guru saat mengajar di sekolah tersebut. Implementasinya adalah dengan membuat semacam angket pembelajaran dan siswa diminta untuk mengisi angket tersebut. Angket tersebut dibuat setelah selesainya kegiatan belajar akhir tahun. Selanjutnya komite sekolah menyampaikan hasil angket tersebut kepada pihak sekolah, dalam hal ini adalah kepada sekolah sebagai hasil rekomendasi evaluasi pengajaran guru. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Hal yang tidak kalah penting pengawasan yang dilakukan komite sekolah selain keuangan dan akademik adalah pengawasan lembaga, dalam hal ini adalah

aset fasilitas sekolah. Adanya banyak fasilitas di SMA Islam An-Nidhon tentu tidak lepas dari peran dan partisipasi komite sekolah, di antaranya lapangan volley, lapangan bulu tangkis, lapangan sepak takraw, lapangan sepak bola, alat drum band, wayang kulit, alat rebana, gedung gabungan sekertariat, dan lain sebagainya yang merupakan bantuan dan hibah masyarakat lingkungan sekolah. Hal tersebut komite sekolah merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam pemeliharannya. bentuk pengawasannya adalah dengan menginfentarisir dan manajemen asset yang dilakukan oleh komite sekolah dan lembaga sekolah. Dengan adanya manajemen asset, maka fasilitas sekolah dapat digunakan sebagaimana mestinya dan terpelihara dengan baik.

Penjelasan tersebut di atas merupakan temuan penelitian yang dilakukan oleh komite sekolah dalam pengawasan lembaga sekolah. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat para ahli di antaranya Suryosubroto (2004: 196) menjelaskan ada tiga hal peran komite sekolah dalam pengawasan sekolah sebagai berikut: a) pengawasan Akademik, yaitu pengawasan yang menitikberatkan pada masalah-masalah akademik, seperti dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada saat siswa sedang proses belajar di kelas, b) pengawasan Administrasi, yaitu pengawasan yang menitikberatkan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya kegiatan pembelajaran. Pengawasan administrasi di dalamnya juga dalam hal pungutan keuangan sekolah kepada siswa-siswinya, baik uang SPP, pembangunan, pengembangan, dan lain sebagainya., c) pengawasan lembaga, yaitu pengawasan yang menitikberatkan pada seluruh wilayah sekolah yang berfungsi meningkatkan nama baik atau kinerja sekolah secara keseluruhan.

Terkait dengan pengawasan komite sekolah terhadap lembaga sekolah, pendapat yang sama dikemukakan Purwanto (2012: 89-90) menjelaskan lebih khusus lagi terkait dengan pengawasan komite sekolah terhadap lembaga sekolah. Ada dua jenis pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah yaitu:

1. Pengawasan umum, artinya pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah, admistrasi kantor sekolah, keuangan sekolah, dan lain sebagainya.
2. pengawasan pengajaran, yaitu kegiatan-kegiatan pengawasan yang ditujukan untuk perbaikan kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya tujuan pendidikan.

Pendapat yang sama juga dikemukakan Yudi (2012: 39) menjelaskan bahwa peran komite sekolah dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan di sekolah tidak hanya terhadap fisik material tetapi juga dalam ranah teknis edukatif di sekolah. Pengawasan meliputi kegiatan akademik seperti proses belajar mengajar, pengawasan terhadap guru dalam mengajar, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan lembaga sekolah, seperti pelaksanaan program-program sekolah, pembiayaan, pembangunan, pengembangan dan lain sebagainya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan temuan penelitian yang dikemukakan pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan Komite Sekolah dengan pihak sekolah dan sebaliknya bukan sebagai hubungan hirarki atau atasan bawahan, melainkan sebagai hubungan kemitraan yang melaksanakan kegiatan secara koordinatif, bukan saling memerintah. Hal tersebut dapat dirasakan di SMA Islam An-Nidhom dengan Komite Sekolahnya. Hubungan Komite Sekolah dengan SMA Islam An-Nidhom terlihat sangat baik dan pemanfaatannya dapat dirasakan oleh sekolah tersebut dan masyarakat sekitar. Karena Komite Sekolah di SMA Islam An-Nidhom dalam melaksanakan tugasnya dengan pendekatan kemitraan demi terwujudnya

program-program sekolah baik program akademik maupun program non akademik.

## SARAN

Penelitian ini perlu ditindak lanjuti terkait dengan peran komite sekolah terhadap lembaga sekolah. Komite Sekolah khususnya komite sekolah SMA Islam An-Nidhom lebih meningkatkan kembali pendekatan kemitraan dan semangat kekeluargaan. kepada lembaga sekolah. Pihak lembaga sekolah juga lebih terbuka lagi dalam semua program-program sehingga seluruh program-program sekolah dapat terwujud dan mudah tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Engkoswara dan Komariah, Aan. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Hidayat, Syarif dan Asrori. *Manajemen Pendidikan (Subtansi dan Implementasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia)*. Tangerang: Pustaka Mandiri. 2013.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung Remaja Rosdakarya, 2011.
- Purwanto, M. Ngalm. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Prihatin, Eka. *Teori Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Rohmat. *Kepemimpinan Pendidikan: Konsep dan Aplikasi*. Purwokerto: STAIN PRESS, 2010.
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhardan, Dadang. *Supervisi Profesional (Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah)*. Bandung: Alfabeta, 2010

- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta, PT : Rineka Cipta, 2004.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012.
- Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU RI No. 12 Tahun 2012). Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012
- Yudi, Hariyadi.. *Penguatan Kelembagaan Komite sekolah*. Jakarta. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar, 2012